

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN 2020 - 2024



Kementerian Pertanian
REPUBLIK INDONESIA





PEMERINTAH KELAS DUNIA



VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI



VISI

TERWUJUDNYA INDONESIA
YANG MAJU YANG BERDAULAT,
MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-
ROYONG



MISI

- Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan;
- Mencapai lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
- Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
- Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

KEBIJAKAN NASIONAL

5 (LIMA) PERIORITAS KERJA PRESIDEN DAN WAKIL BUTIR
4 FOKUS PADA REFORMASI BIROKRASI



1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur; Interkoneksi kawasan Industri kecil, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan;



2. Pembangunan Sumberdaya Manusia; Menjamin Kesehatan terutama ibu hamil dan anak usia sekolah serta meningkatkan Pendidikan dan Manajemen Talenta



3. Undang Investasi seluas luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan; Memangkas Hambatan Investasi;



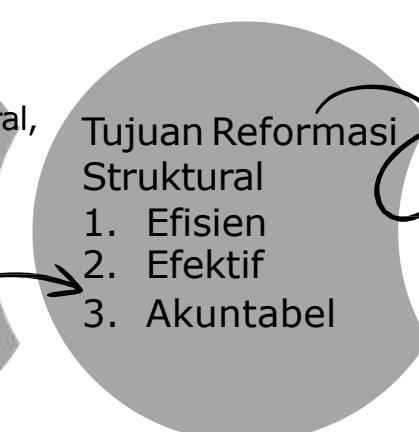
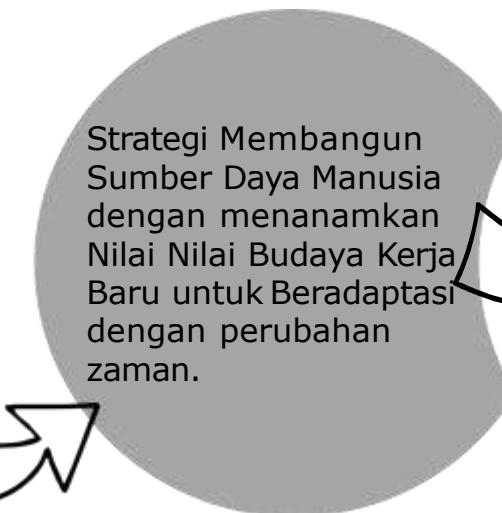
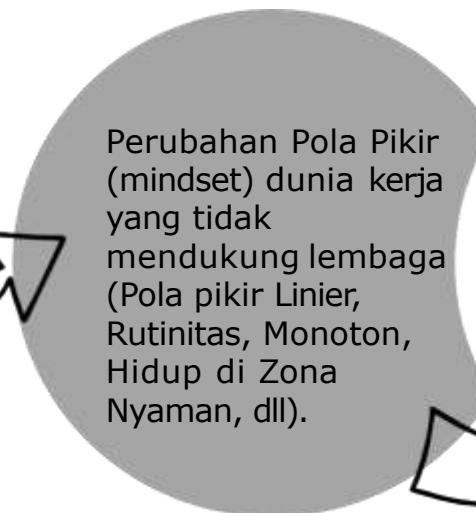
4. Reformasi Birokrasi; Kecepatan Melayani dan memberi izin. Menghapus pola pikir linier, monoton dan hidup di zona nyaman. Prilaku Adaptif, produktif, inovasi dan Kompetitif.



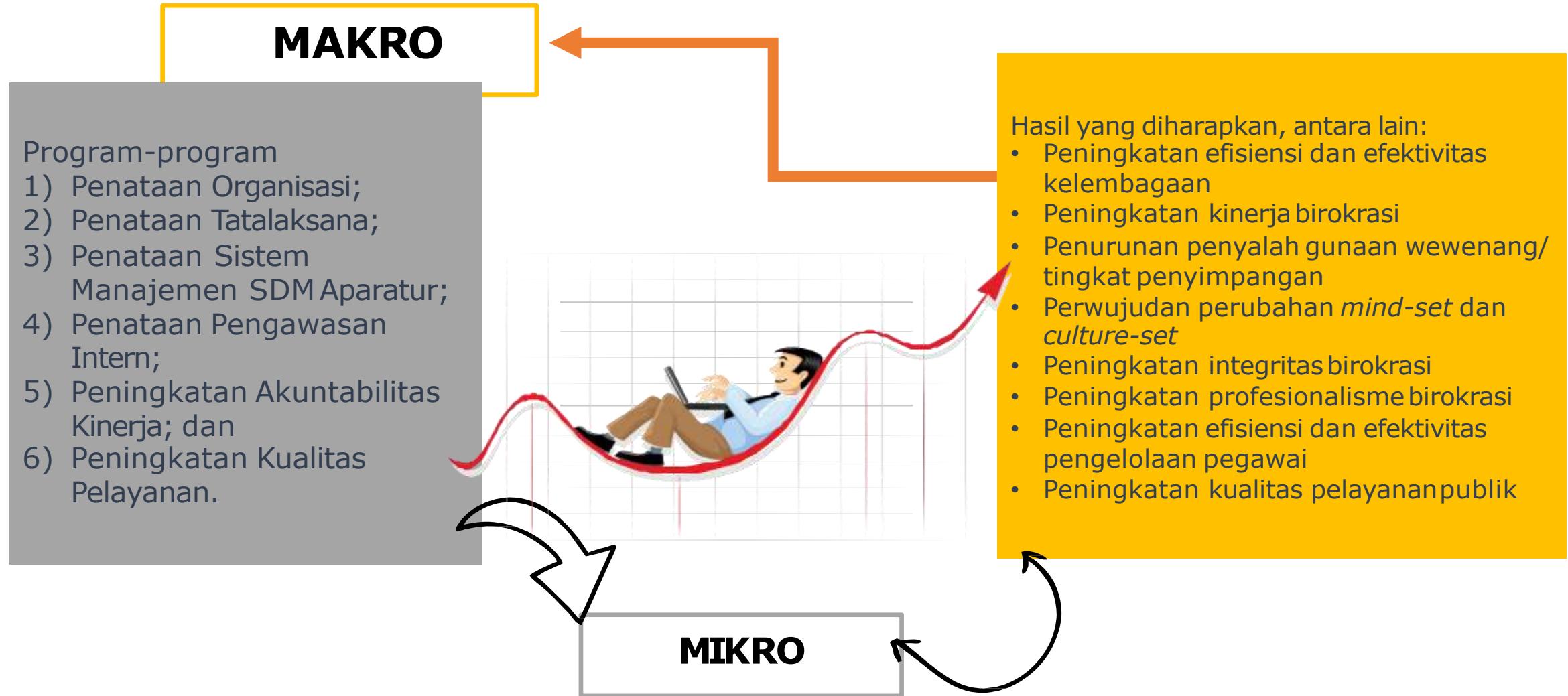
5. APBN yang fokus dan Tepat Sasaran. APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.



KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL YANG DIHARAPKAN KEDEPAN



IDENTIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TINGKAT MAKRO



IDENTIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TINGKAT MESO



IDENTIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TINGKATAN MIKRO

Program-program:

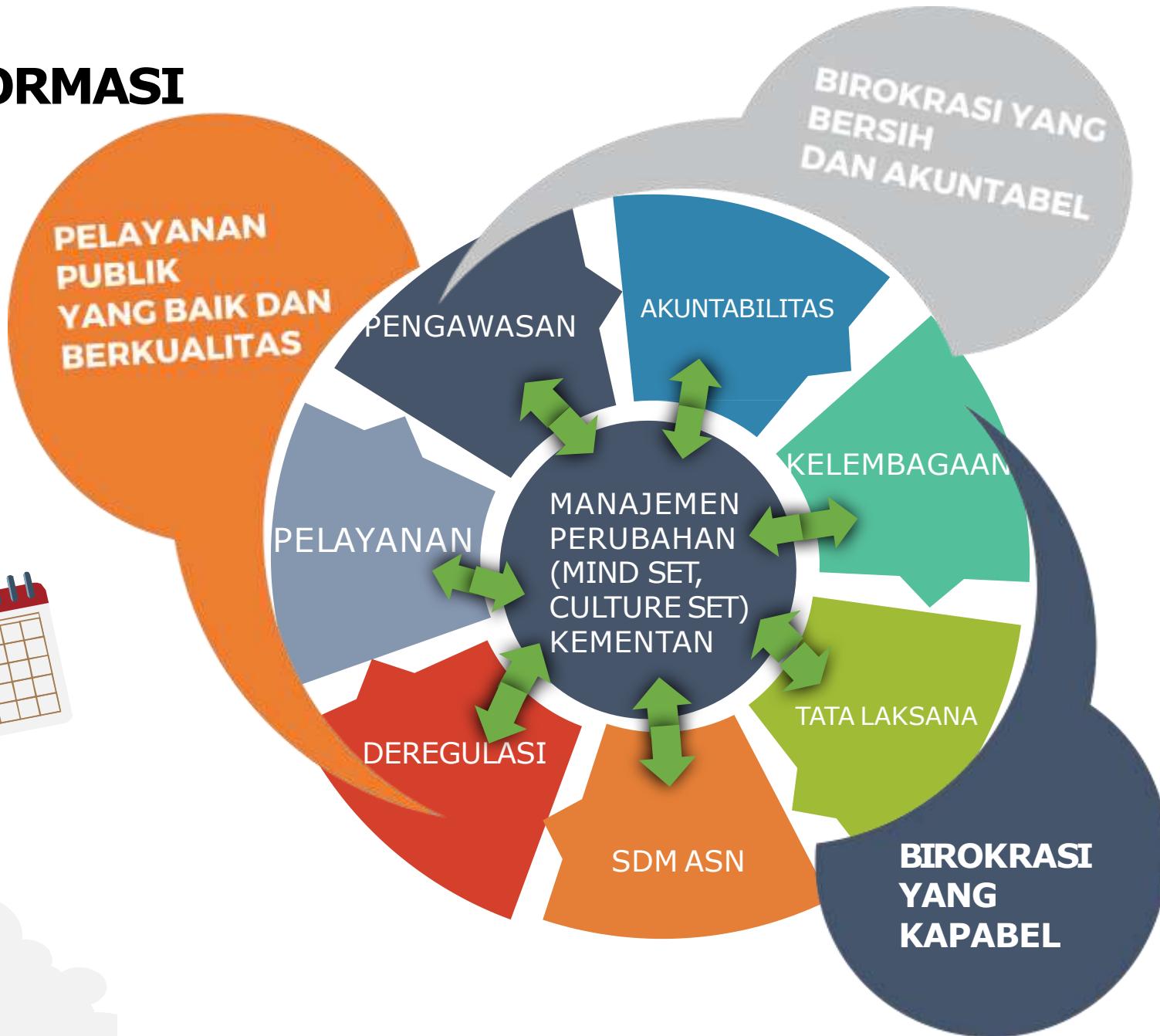
- 1) Quick Win;
- 2) Manajemen Perubahan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksanaan;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 6) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Penataan Pengawasan Internal;
- 8) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
- 9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;



Hasil yang diharapkan, antara lain:

- Peningkatan kepercayaan masyarakat
- Efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi
- Efektivitas dan Efisiensi organisasi
- Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan SDM aparatur
- Peningkatan profesionalisme SDM aparatur
- Peningkatan kesejahteraan aparatur
- Peningkatan kualitas pelayanan
- Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan kebijakan
- Peningkatan kinerja
- Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Peningkatan kapabilitas

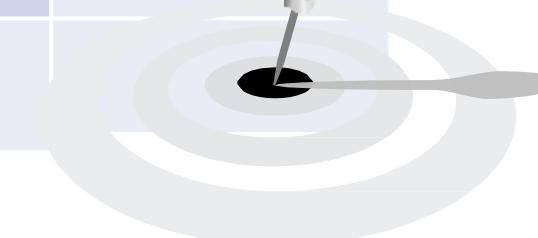
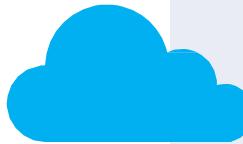
DELAPAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI





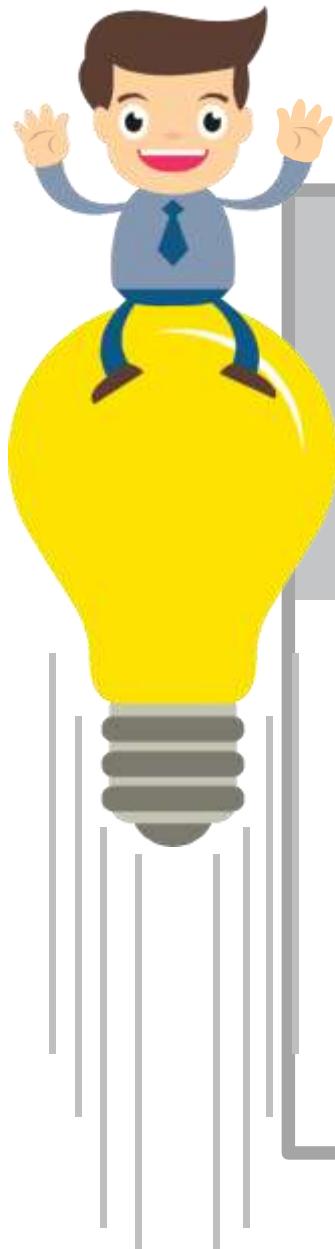
SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI

Sasaran	Indikator	Base Line (2020)	Target (2024)
BIROKRASI BERSIH DAN AKUNTABEL	1. INDEK PRILAKU ANTI KORUPSI MINIMAL BAIK	na	100 %
	2. PERDIKAT SAKIP MINIMAL B	96,40 %	100%
	3. OPINI BPK (WTP)	94 %	100 %
BIROKRASI YANG KAPABEL	1. INDEK KELEMBAGAAN BAIK	na	100 %
	2. INDEK SPBE MINIMAL BAIK	74 %	100 %
	3. INDEK PROFESIONAL ASN	65,7 %	100 %
BIROKRASI MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS	INDEK PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK	59,52 %	100 %



PERBANDINGAN PROGRAM ANTAR TINGKATAN PELAKSANAAN

PROGRAM UNTUK TINGKAT



- 1) Penataan Organisasi;
- 2) Penataan Tata Laksana;
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 4) Penataan Pengawasan;
- 5) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

MAKRO



- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Konsultasi dan Asistensi;
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- 4) *Knowledge management.*

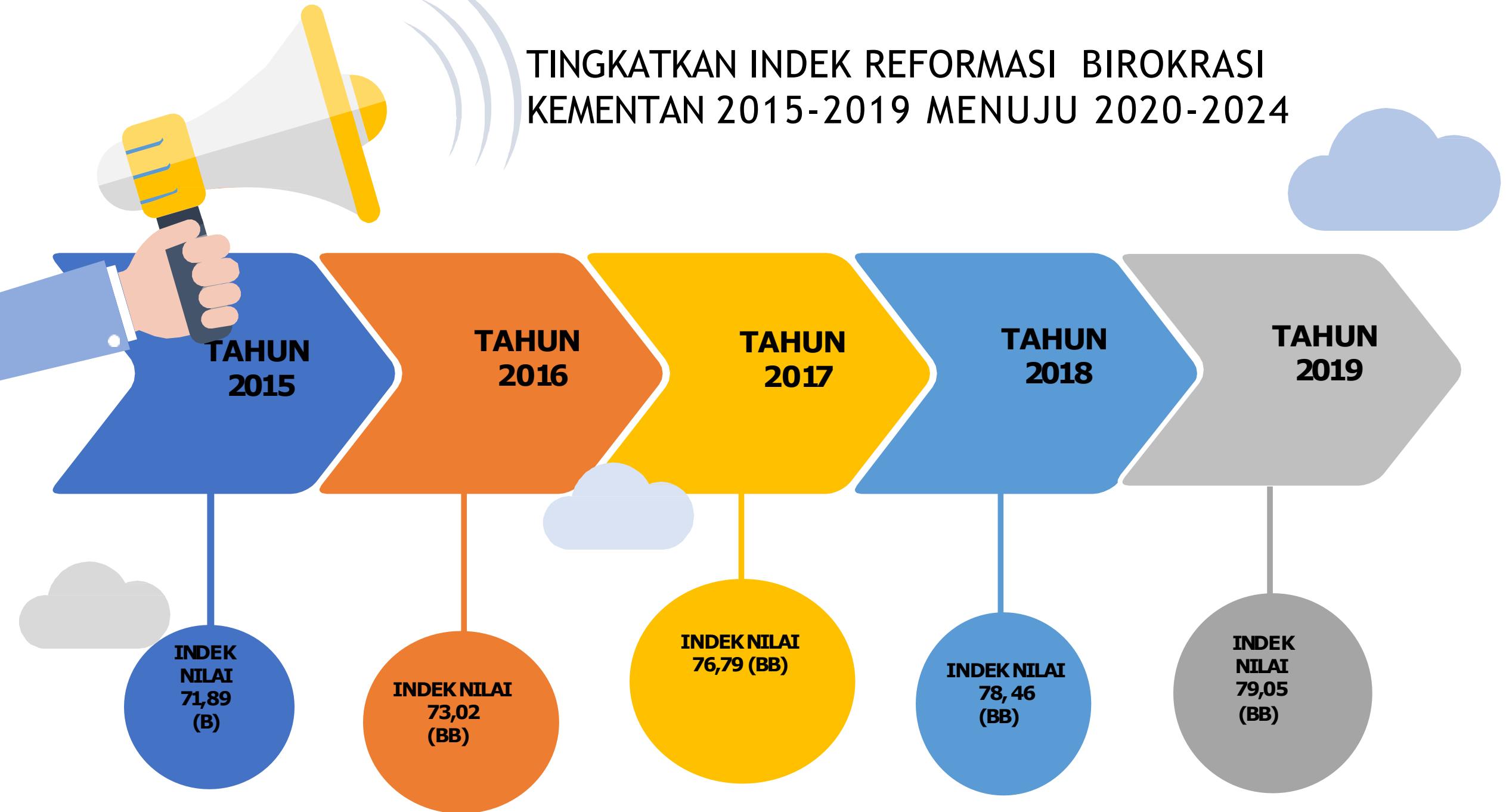
MESO



- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tata laksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 6) Penguatan Pengawasan;
- 7) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 9) Monitoring, Evaluasi, da Pelaporan.

MIKRO

TINGKATKAN INDEK REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN 2015-2019 MENUJU 2020-2024





PERISTIWA PERTAHANKAN DAN PERBANYAK HASIL PRESTASI REFORM KEMENTERIAN PERTANIAN



Menteri RI Terima Anugerah Gatra Awards 2020

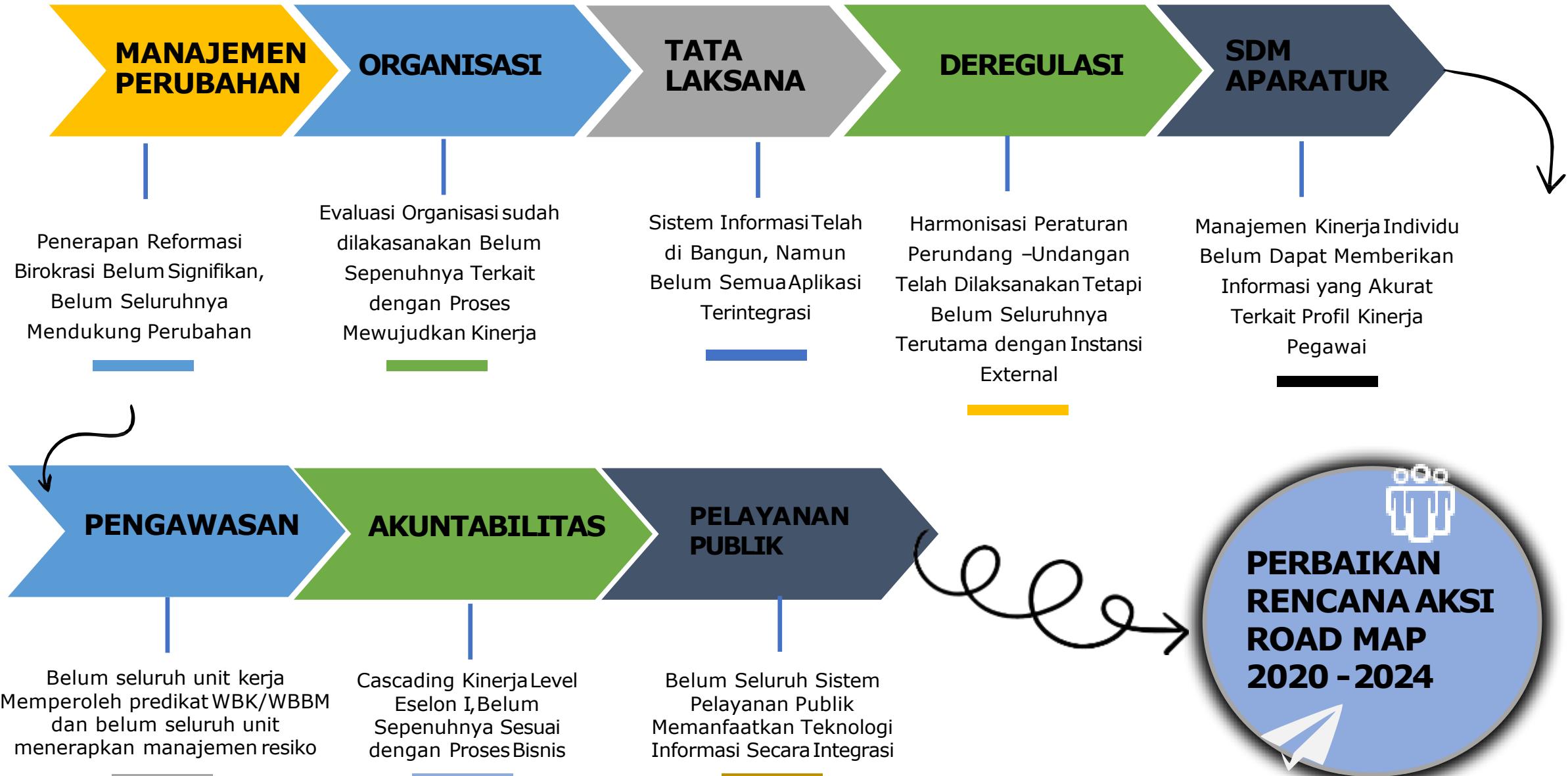
Menteri Pertanian (Mentan) Syahru Yasin Limpo diangkat penghargaan dedikasi dan pengabdian tanpa batas dalam acara Gatra Awards 2020. Menteri mendapat apresiasi besar sebagai mentari yang mampu mendongkrak ketahanan serta ekspor pangan selama pandemi Covid-19. Dalam sambutan secara

virtualnya, Mentan Syahru menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Gatra terhadap kinerja Kementerian Pertanian (Kementerian) selama setahun terakhir. Dua berharga penghargaan Gatra Awards mampu menjadi model dan semangat besar untuk bekerja lebih keras lagi. (*)



**Penghargaan
Pengelolaan LHKPN
Terbaik 2019**

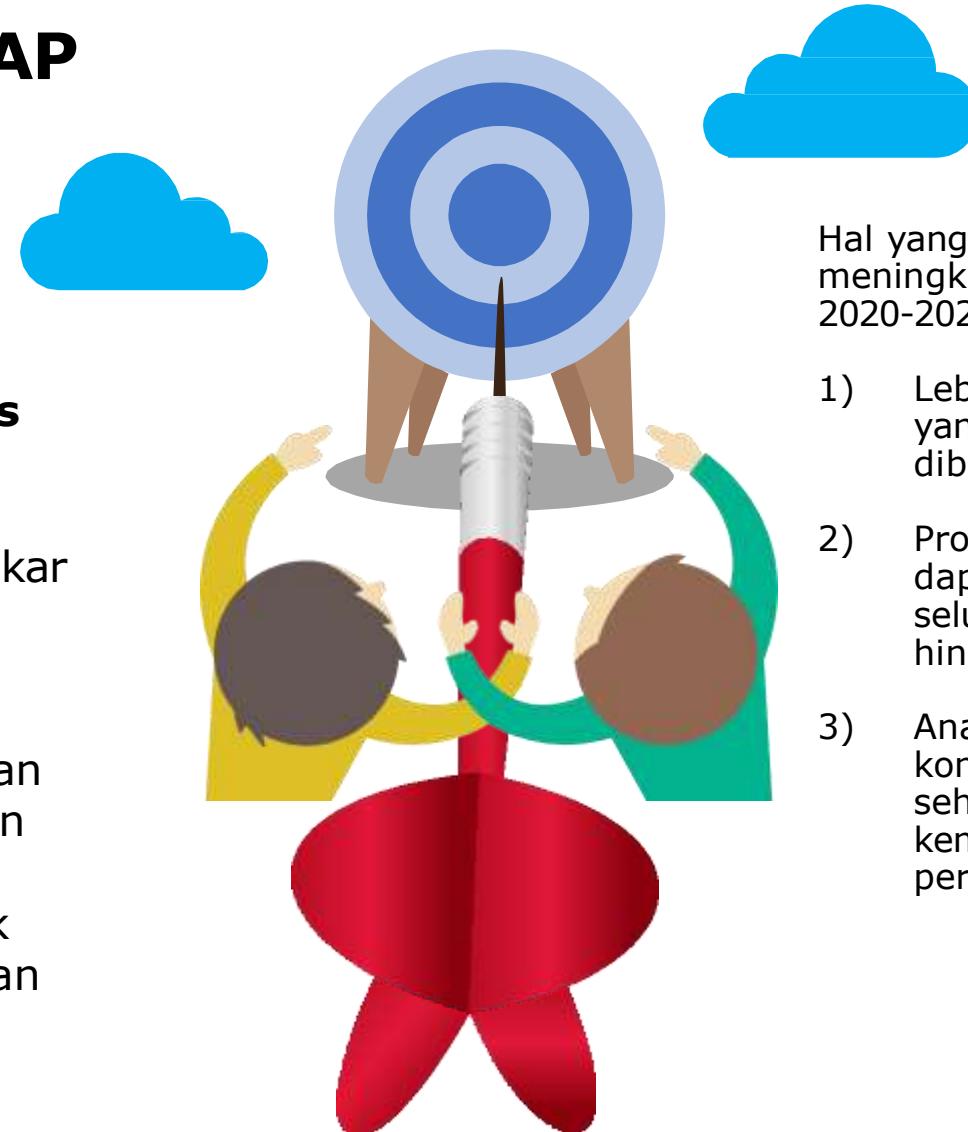
ISU KONDISI BIROKRASI KEMENTERIAN SEBUAH CATATAN EVALUASI RB 2019



KEBIJAKAN NASIONAL ROAD MAP RB 2020-2024

Mengedepankan 2 (dua) asas utama yaitu **Fokus dan Prioritas**

- 1) Fokus :upaya RB akan dilakukan berfokus pada akar permasalahan tata Kelola pemerintahan.
- 2) Prioritas :setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata Kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

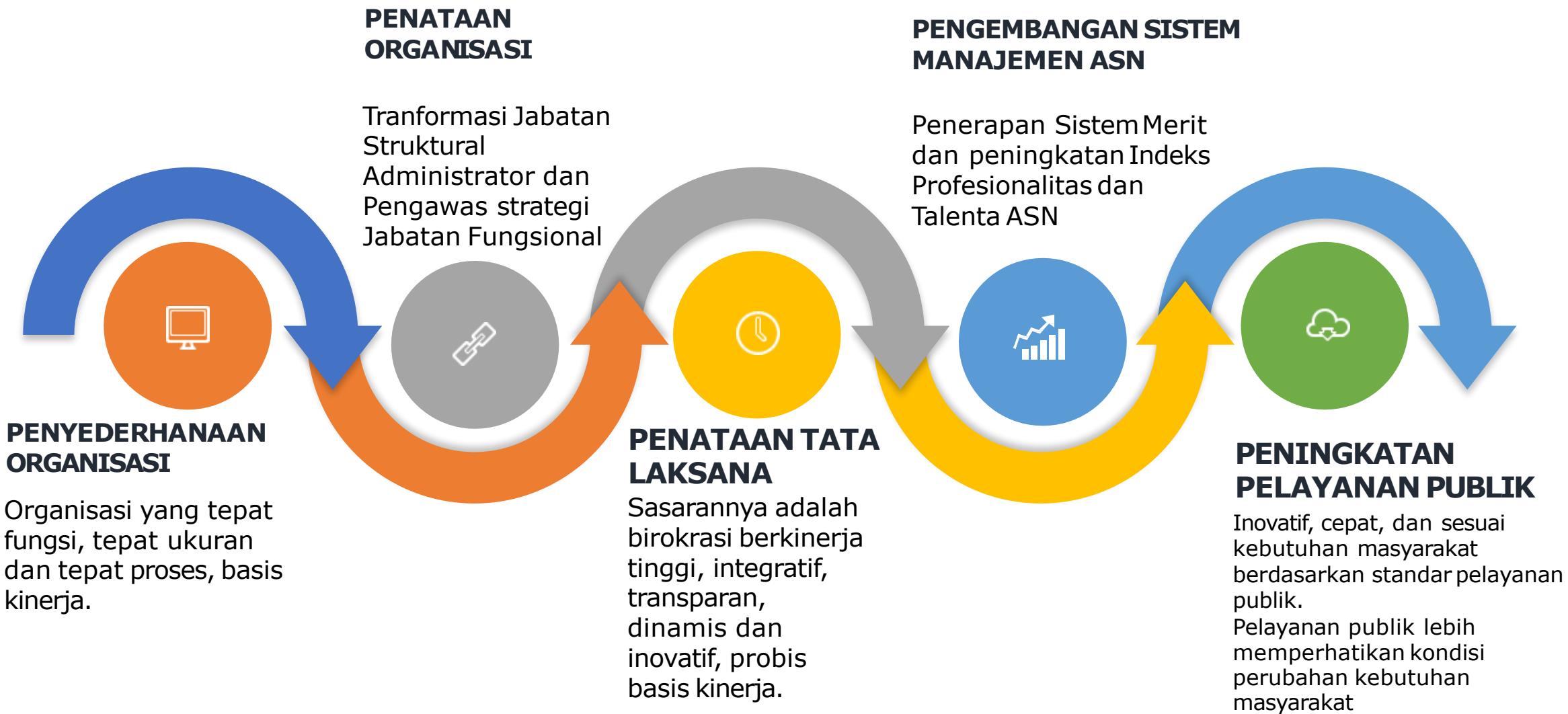


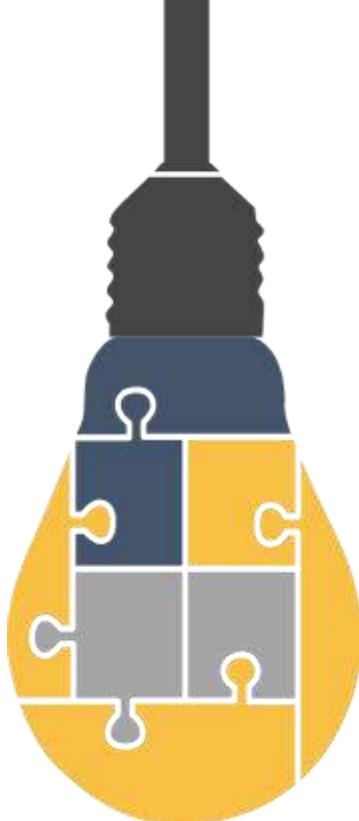
Hal yang diperbaharui guna meningkatkan kualitas road map RB 2020-2024:

- 1) Lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas.
- 2) Program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan oleh seluruh unit kerja, mulai dari pusat hingga yang berada di daerah (UPT).
- 3) Analisi dilakukan secara holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan RB yang lebih utuh.



KEBIJAKAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI 2020-2024





SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

1

BIROKRASI YANG
BERSIH DAN
AKUNTABEL

2

BIROKRASI YANG
KAPABEL

3

PELAYANAN
PUBLIK PRIMA
BERKUALITAS

- DEREGLASI
- AKUNTABILITAS
- PENGAWASAN

- Manajemen Perubahan
- Deregulasi
- Organisasi
- Tatalaksana
- SDM Aparatur

- PELAYANAN PUBLIK

Target Kedepan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024

1



REFORM MINDSET CULTURE SET

Manajemen perubahan diharapkan mengubah sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja, secara sistematis dan konsisten, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

2

DEREGULASI

Organisasi semakin dituntut untuk menjadi adaptif terhadap kebutuhan strategis nasional, membuka seluas-luasnya investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bidang pertanian, serta menghilangkan semua hambatan terhadap investasi bidang pertanian

3

TRANSFORMASI ORGANISASI

Perubahan dalam Area Penataan Kelembagaan dapat dilihat dari struktur organisasi ramping dan *flat* (tidak banyak jenjang hirarki dan struktur organisasi lebih dominan pemegang jabatan profesional atau fungsional daripada jabatan administrasi)

4

REFORM SDM

Program penataan sistem manajemen SDM Aparatur telah dilakukan melalui kegiatan analisis jabatan, analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai, penetapan sasaran kinerja pegawai, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, penegakan disiplin, penerapan pola karir/sistem merit, dan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi

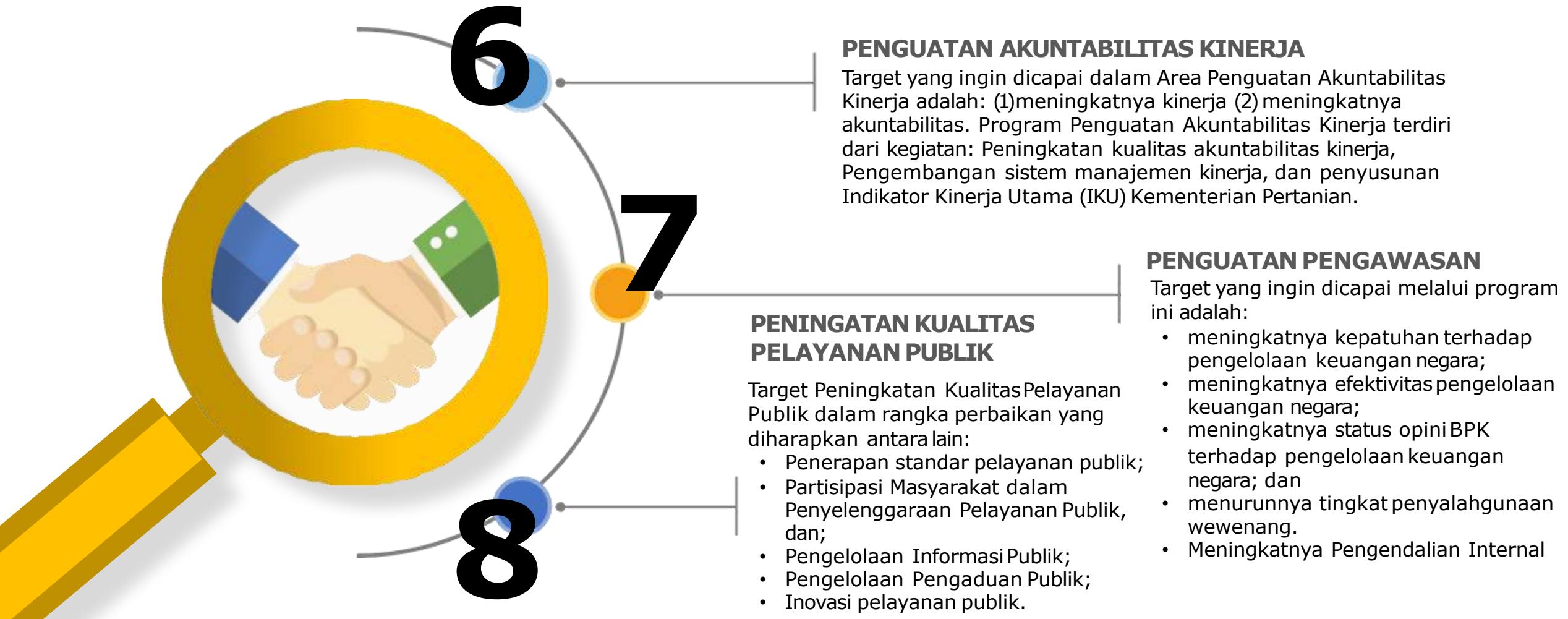
5

REFORM DIGITAL

Program penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Target tata laksana dalam agenda reformasi birokrasi adalah:

- meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen;
- meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen; dan
- meningkatnya kinerja organisasi maupun individual.

Target Kedepan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024



Target Kedepan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024

Quick Wins Unit Kerja

- Di Lingkungan Kementerian Pertanian ditetapkan Quick Wins Unit Kerja untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- Seluruh Unit Kerja Quick Wins mempunyai karakteristik yang berbeda yang mencerminkan keberagaman jenis pelayanan.



9 QUICKWINS

FOKUS PADA HASIL REFORMASI



Quick Wins Mandatory

Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi Quick Win Instansi pemerintah.

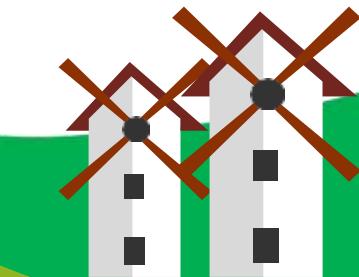


Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan **Program percepatan** dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Quick Wins Program

- Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan, ditetapkan Quick Wins Program untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- Keberhasilan Quick Wins ini sebagai pelaksanaan dan pencapaian sasaran tugas dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja Eselon I.



MANAJAMEN TATAKELOLA RB PUSAT KEMENTAN

TIM KERJA REFORMASI BIROKASI KEMENTAN



MENTERI PERTANIAN

Mengarahkan Kebijakan Reformasi Kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
Dalam Tatakelola Pemerintah yang Baik.



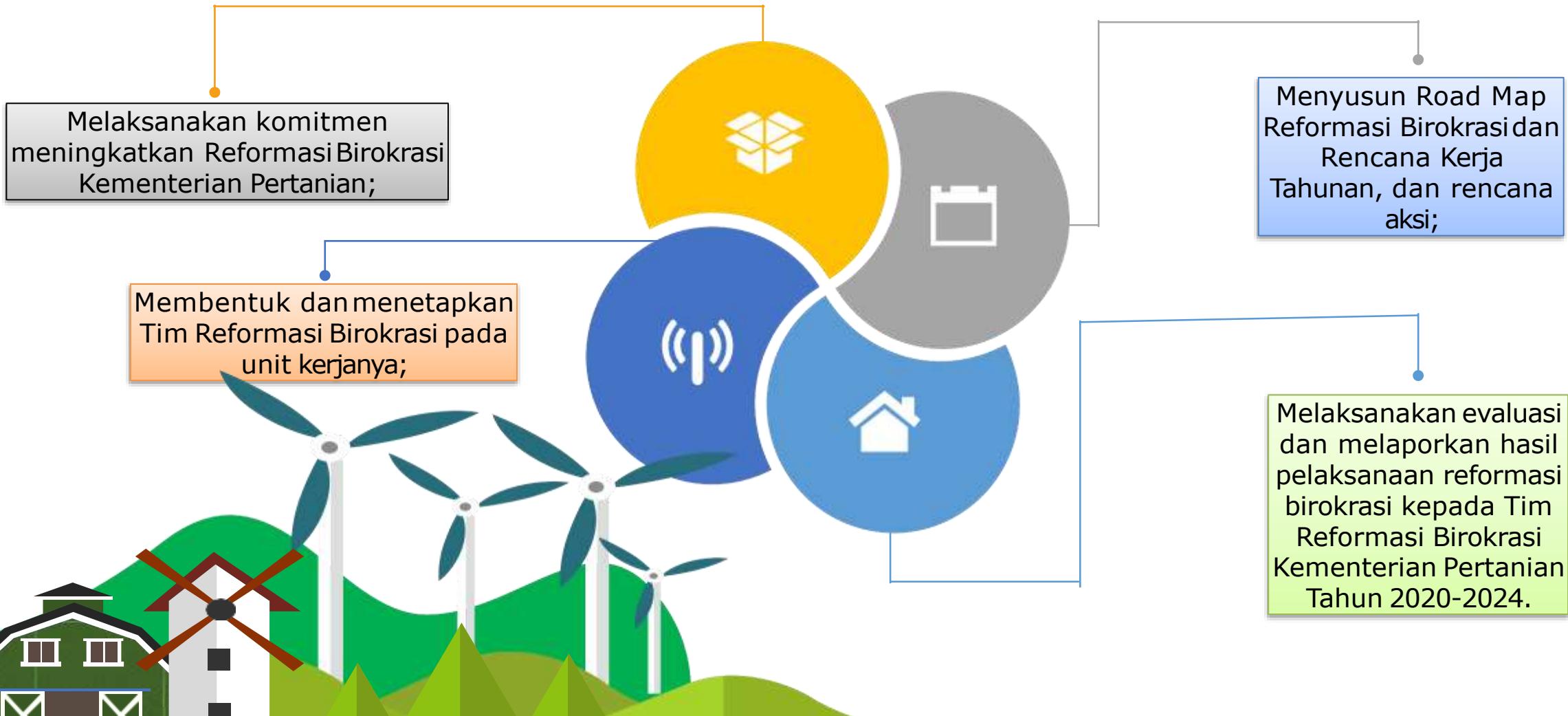
KETUA TIM REFORM SEKRETARIAT JENDERAL

- merumuskan dan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- melaksanakan konsultasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian;
- melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai, stakeholder dan masyarakat;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- melaksanakan supervisi kepada Tim RB Unit Kerja Eselon I serta melaksanakan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan RB
- menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

MANAJAMEN TATAKELOLA RB PUSAT ES. I KEMENTERAN

TUGAS TIM UNIT KERJA ESELON I

Berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing unit kerjanya



MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN

Kegiatan *monitoring* dilakukan secara berkala oleh Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing area perubahan dan unit kerja eselon I dan UPT, dilakukan dengan berbagai metode sebagai berikut:

- Dokumentasi
- Survei
- Observasi lapangan
- Wawancara
- Campuran
- Webinar
- Zoom



MONITORING

EVALUASI



Tim Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala. Evaluasi dilakukan berdasarkan rencana aksi masing-masing area perubahan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab melalui rapat kerja teknis Tim Reformasi Birokrasi

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi juga mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



PELAPORAN

Tim Reformasi Birokrasi menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian berdasarkan laporan dari masing-masing area perubahan, unit kerja eselon I, dan UPT yang disampaikan kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal.





Biro Organisasi dan Kepegawaian
Kementerian Pertanian
REPUBLIK INDONESIA

THINK
AHEAD

(BERPIKIR KEDEPAN)

THINK
AGAIN

(MENGKAJI ULANG
CARA BERPIKIR)

THINK
ACROSS

(BERPIKIR LATERAL,
HORIZONTAL, LINTAS
DISIPLIN)



- Reformasi Birokrasi dimulai dari pegawai yang mau merubah pola pikir dan budaya kerja sesuai tujuan organisasi.
- Sekecil apapun kontribusi PNS terutama kinerja yang maksimal akan mendukung pencapaian target kinerja organisasi.
- Keberhasilan pencapaian target reformasi birokrasi merupakan perwujudan peran aktif dari seluruh PNS Kementerian Pertanian.